

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Kinerja Dinas diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya.

Ruteng, 9 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial,

DRS. LAMBERTUS SAHE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621231 199203 1 210

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian LAKIP

BAB II. PERENCANAAN

Rencana Strategis 2021 - 2026

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan, Sasaran Strategis dan Program
- d. Rencana Kinerja Tahunan 2021
- e. Perjanjian Kinerja Tahunan 2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Uraian Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategis Peningkatan Kinerja
- C. Uraian Ringkas Strategis Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra
2. IKU
3. Pengukuran Kinerja

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategis Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian Lakip

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan PMKS dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai, komitmen pembangunan kesejahteraan sosial tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2016-2021, dengan strategis mencegah timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial dan Memberikan Pelayanan Sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasis masyarakat/komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dengan arah kebijakan Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk merealisasikan agenda strategis tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016-2021 juga Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup Program pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, Perlindungan dan jaminan Sosial serta Bantuan Sosial.

Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Lanjut serta Penyediaan pelayanan Sosial melalui 7 (Tujuh) Panti terhadap 5 jenis Penyandang Permasalahan kesejahteraan Sosial, disamping juga melaksanakan fungsi manajemen dan program pengembangan sumber daya kesejahteraan Sosial.

I. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai maka Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri dari:

- a) Bidang Pemberdayaan Sosial
- b) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d) Bidang Bantuan Sosial

Secara umum, capaian hasil pembangunan kesejahteraan sosial menunjukkan perkembangan yang baik dalam artian bahwa capaian pada tahun 2021 Dinas Sosial menetapkan target penanganan PMKS sebanyak **7.481** orang. Sedangkan realisasi penanganan PMKS mencapai **9.011** orang atau **120%**. Hasil Pembangunan Kesejahteraan Sosial ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan serta penurunan angka Disparitas Wilayah.

Pencapaian kinerja tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Kendala Internal diantaranya adalah kualitas SDM penyelenggara dan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial yang masih terus menerus ditingkatkan, kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan kendala dan tantangan eksternal diantaranya adalah Sinergitas antar unit dan program serta ketersediaan anggaran yang belum memadai serta kecenderungan masih banyaknya populasi PMKS yang belum mendapatkan aksesibilitas pelayanan. Disisi lain, tantangan yang harus dihadapi Dinas Sosial adalah semakin besarnya tuntutan publik dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang sarannya diarahkan kepada Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, sehingga memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga maupun masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi: Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan situasi dan kondisi politik di Indonesia, serta perkembangan masyarakat secara global dan Pembangunan yang kurang optimal, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.

Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan turut serta bekerjasama sebagai mitra kerja Pemerintah dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan perkembangan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan sesuai keberadaan dan peranannya sebagai Potensi sumber Kesejahteraan sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai yang bertugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial. Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi ini mengamanatkan tanggung jawab kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam membina masyarakat miskin, orang terlantar, para penyandang cacat, masyarakat yang berada pada daerah rawan sosial dan ekonomi.

Sebagai sebuah Perangkat Daerah Dinas Sosial juga wajib mempertanggung jawabkan kinerjanya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah, daerah, kementerian/lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial selama Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sbb :

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	120%
	Rata-rata	120%
	KATEGORI	MEMUASKAN

II. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI / PERAN ORGANISASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Manggarai, periode 2016-2021 difokuskan pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai melalui Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yaitu: “**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PRODUKTIF,**

BERDAYA SAING DAN MANDIRI,” terdapat berbagai jenis tantangan yang harus dihadapi antara lain permasalahan dibidang sosial masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana.

Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah.

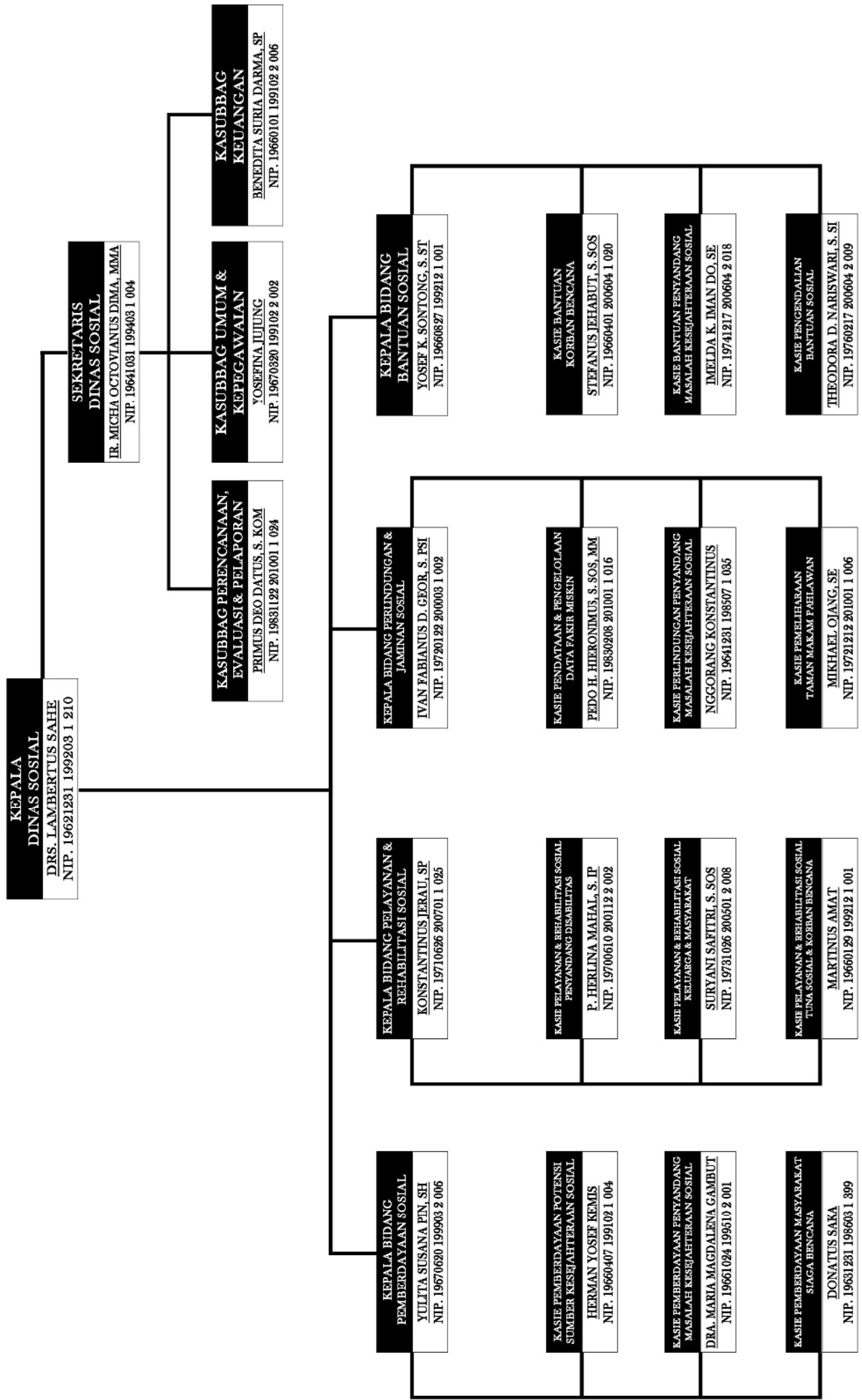
Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya. Keberhasilan yang telah dicapai dalam perjalanan historis penyelenggaraan pemerintahan dibidang sosial akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan kedepan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian besar penduduk khususnya di Kabupaten Manggarai, masih rendahnya daya dorong perekonomian serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi beban sosial baik dari jumlah PMKS maupun keterbatasan dana untuk mengintervensi PMKS.

III. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Struktur Organisasi Dinas Sosial Terlampir

IV. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP :

- BAB I : Pendahuluan yang memuat : Latar Belakang, Data Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian
- BAB II : Perencanaan Kinerja yang memuat Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- BAB III : Akuntabilitas kinerja yang memuat, Uraian Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Sasaran, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya dan Realisasi Keuangan
- BAB IV : Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Pembangunan pada hakekatnya merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat. Pada arus lokal, pemberdayaan masyarakat berarti pengembangan potensi yang ada dan dimiliki masyarakat untuk mencapai keadaan sejahtera. Untuk itulah perumusan visi yang jelas sangat penting peranannya bagi sukses tidaknya program pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Manggarai, Visi Pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai untuk periode 2021-2026 adalah **“MANGGARAI MAJU, ADIL, DAN BERDAYA SAING”**. Rumusan visi RPJMD periode 2021-2026 memiliki keterkaitan secara substansi maupun kata dengan Visi RPJPD. **ADIL** merupakan rumusan pokok visi yang memiliki persamaan dengan visi RPJPD, sedangkan **MAJU** dan **BERDAYA SAING** tidak terdapat di dalam visi RPJPD, namun tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan tersebut berupa harapan tentang kondisi daerah yang semakin maju dan berdaya saing di akhir periode pembangunan jangka panjang, sehingga mampu mencapai visi RPJPD makmur, sejahtera, adil, dan berkelanjutan di tahun 2026. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 juga dioperasionalkan melalui jargon “Manggarai Mberes” yang artinya Manggarai Kuat. Hal tersebut merupakan bentuk operasionalisasi visi Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing melalui penguatan-penguatan pada sektor unggulan yang akan menjadi dasar penopang kekuatan Kabupaten Manggarai, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Melalui jargon tersebut diharapkan kedepannya tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing memiliki peran untuk menciptakan Kabupaten Manggarai yang maju dan kuat ketahanan ekonomi dan sumber daya manusianya

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menggambarkan seluruh aspek umum pembangunan yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan Kabupaten Manggarai. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai 2021-2026 sebagai berikut:

1. **MISI 1: MENINGKATKAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA**
2. MISI 2 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
3. MISI 3 : MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP
4. MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI

Permasalahan di bidang sosial di masa-masa yang akan datang masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, serta tingginya angka pengangguran. Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan di bidang sosial telah diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya.

A. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM

TUJUAN
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT

SASARAN
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

PROGRAM

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Dengan metode penyusunan seperti ini diharapkan Rencana Kinerja Tahunan selama 5 tahun dapat menjawab permasalahan yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat Manggarai, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	PERSENTASE PMKS YANG TERTANGANI	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Setiap sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program tergabung sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan manajemen yang baik, karena rencana kinerja menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan dapat menjadi tolok ukur bagi organisasi/PD mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. ***(Perjanjian Kinerja terlampir)***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah bentuk tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Didalam bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pengukuran kinerja termasuk juga uraian sistematis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala tersebut.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan setelah dilakukan penetapan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi variabel masukan (*input*), variabel keluaran (*output*), dan variabel hasil (*outcome*). Hasil pengukuran kinerja dianalisis untuk menemukan alasan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Poin penting dari hasil pengukuran tersebut adalah memberikan umpan balik bagi upaya memelihara keberhasilan dan perbaikan kinerja kedepan jikalau ditemukan kegagalan dengan pelbagai permasalahannya.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan, maka capaian dimaksud dibagi dalam 5 (lima) kategori seperti berikut :

No	Capaian Kinerja	Kategori/Makna
1	≥100	Memuaskan
2	≥ 85-99	Sangat baik
3	≥ 70-84	Baik
4	≥50-69	Cukup
5	≤49	Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kinerja Tahunan 2022 untuk mencapai sasaran strategis RPJMD.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis ada di atas 100%.

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	120%
Rata-rata		120%
Kategori		MEMUASKAN

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kebutuhan dasar dan fungsi sosial bagi PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan **sosial**) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan criteria. Dan untuk tingkat Kabupaten Manggarai ada 5 jenis PMKS dengan uraian sebagai berikut :

1. **Anak Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

1. Berasal dari keluarga fakir miskin;
2. Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga);
3. Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau;
4. Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
5. Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP;
6. Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari;
7. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai;
8. Bila sakit tidak diobati;
9. Yatim, Piatu, Yatim piatu;
10. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin;
11. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.

2. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

1. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
2. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
3. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
4. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;

5. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
 6. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda;
3. **Lanjut Usia Terlantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

1. Tidak ada keluarga yang mengurusnya;
2. Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya;
3. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya;
5. Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin;

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- **LUT Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa;
- **LUT Tidak Potensial** : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

4. **Korban Bencana Alam** adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- 1.korban jiwa;
- 2.kerusakan lingkungan;
- 3.kerugian harta benda; dan
- 4.dampak psikologis.

5. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

1. Perempuan berusia 18 – 59 tahun;
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
3. Menjadi pencari nafkah utama keluarga;
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. (cek istilah BPS);

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Manggarai relatif kecil/terbatas, dimana intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosial PMKS juga rendah sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya dibantu jumlahnya cukup banyak.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator persentase lanjut usia dan penyandang disabilitas yang dibantu.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 179.146.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 178.779.750 atau 99,80%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok berupa sembako bagi Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas, kemudian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.

2. Indikator persentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibantu, Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah Rp 86.212.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 85.949.480 atau 99,70%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Pembinaan dan pemberian bantuan benang tenun bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Realisasi indikator ini 100%. Angka ini diperoleh dari jumlah kelompok Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat bantuan pelatihan sebanyak 8 Kelompok dari target kelompok Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi pada tahun 2021 sebanyak 8 Kelompok.

3. Pada Tahun 2021, untuk menentukan Indikator persentase Anak Terlantar yang dibantu, Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penanganan Bencana. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah Rp 50.667.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 46.466.650 atau 92%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk bantuan kebutuhan pokok/dasar bagi penghuni panti asuhan (7 Panti). Realisasi indikator ini diperoleh dari jumlah Panti yang mendapatkan bantuan sebanyak 7 Panti dari total Panti yang ada pada tahun 2020 sebanyak 7 Panti.

4. Indikator Korban Bencana yang dibantu, Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial. Jumlah anggaran untuk mendukung indikator ini adalah Rp 16.196.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp 7.856.000 atau 49%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk bantuan beras bagi Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Manggarai. Realisasi indikator ini 177%. Angka ini diperoleh dari target jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial pada tahun 2021 sebanyak 5000 Orang dan realisasi jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan bantuan sebanyak 8862 Orang.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Target dan Realisasi Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.809.519.800 dari total Anggaran Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp23.134.946.368 atau sebesar 68% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	2.224.590.618,-	2.141.720.833,-	96,27
	Belanja Barang dan Jasa	967.205.750,-	790.420.187,-	81,72
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	19.933.400.000	12.867.726.780	64,55
2.	Belanja Modal	-	-	-
	TOTAL	9.750.000,-	9.652.000,-	98,99

Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai mendapatkan alokasi belanja pada anggaran perubahan sebesar Rp23.134.946.368, sebagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam membantu masyarakat melewati masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021.

Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 Terlampir

Bab IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil mencapai target. Persentasi rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2021

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang adalah :

- Prioritas dan efisiensi anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan masalah kesos;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

3. URAIAN RINGKAS MASALAH YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara umum masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2021, adalah masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial apabila dikaitkan dengan luasnya jangkauan pelayanan sosial yang sangat kompleks.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan:

- Menerapkan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan;
- Alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan.

Ruteng, 9 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial,

DRS. LAMBERTUS SAHE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621231 199203 1 210